

BAB 2

LATAR BELAKANG HUBUNGAN PAN-ISLAMISME DENGAN UMAT ISLAM DI HINDIA BELANDA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai makna Pan-Islamisme dan latar belakang yang menjadikan Pan-Islamisme bisa muncul di Hindia Belanda, terutamanya mengenai kondisi sosial politik umat Islam Hindia Belanda sebelum memaski tahun 1882.

2.1 Terminologi Pan-Islamisme

Sebelum membahas lebih jauh mengenai hubungan Pan-Islamisme dengan Hindia Belanda ada baiknya terlebih dahulu mengetahui definisi dari Pan-Islamisme itu sendiri. Pan-Islamisme sendiri bisa dimaknai sebagai ‘Persatuan Islam’, walaupun sebenarnya istilah ini agak rancu, karena secara historis lahirnya istilah ini tidak lahir dari khazanah Islam. Penggunaan terminologi ‘Pan-Islamisme’ sendiri, pertama kali digunakan oleh seorang jurnalis Prancis yang bernama Gabriel Charmes, yang begitu penasaran dengan Khilafah Utsmaniyyah, sehingga sepanjang tahun 1880-an, ia banyak menulis tentangnya. Salah satu contohnya adalah artikel yang ditulis Charmes dengan judul ‘*La Situation de la Turquie*’. Kemudian dalam sub-babnya yang diberi judul ‘*La Politique du Califat et ses consequences*’, Charmes menjelaskan tentang reaksi Muslim atas penjajahan Prancis di Tunisia serta bagaimana Khilafah Utsmaniyyah memobilisasi opini kaum Muslim untuk menentang penjajahan tersebut, Charmes menyebut agitasi Khilafah Utsmaniyyah ini dengan sebutan ‘Pan-Islamisme’. Istilah seperti ini memang lazim digunakan di kalangan Eropa untuk menyebut kegiatan yang mengajak kepada persatuan etnis, bangsa, maupun benua; seperti ‘Pan-Slavisme’, ‘Pan-Jermanisme’, ‘Pan-Amerikanisme’, ‘Pan-Asianisme’, ‘Pan-Afrikanisme’, dan sebagainya. Dengan demikian, memang bisa dikatakan bahwa Charmes merupakan orang yang kemudian bertanggungjawab dalam populernya istilah ‘Pan-Islamisme’ di kalangan Eropa.³⁰

³⁰ Nicko Pandawa, op.cit, hlm. 50; Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad Ke-20*. Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2012, hlm. 236.

Meski begitu, sebenarnya ide mengenai persatuan Islam (sedunia) sendiri telah beredar secara diam-diam di kalangan kaum muslim Turki, terutama dikalangan Utsmani Muda. Di kalangan Muslim Turki sendiri, langkah Khilafah Utsmaniyyah untuk mempersatukan dunia Islam di bawah satu kepemimpinan disebut dengan istilah '*Ittihad-i Islam*'. Istilah ini digunakan pertama kali dalam suatu artikel anonim yang beredar di Istanbul pada 1868, yang menyatakan bahwa sultan-sultan Khilafah Utsmaniyyah berencana untuk menyatukan kaum Muslim sedunia. *Ittihad-i Islam*, yang disebut oleh sarjana Turki kontemporer sebagai *Islam Birliği*, yang jika diartikan ke dalam bahasa Arab menjadi *al-Wahdah al-Islamiyyah* atau *Jami'ah al-Islam*, yang kesemuanya memiliki arti yang sama yakni 'persatuan Islam' atau 'perhimpunan Islam'. Terminologi dan pemakaian istilah bahasa Arab tersebut pertama kali dipakai dalam artikel-artikel majalah *al-Urwah al-Wusqa*, yang dipublikasikan oleh Jamal al-Din al-Afghani dan Muhammad 'Abduh pada 1884.³¹

Secara konseptual sendiri, istilah Pan-Islamisme ini mengacu kepada suatu ideologi yang menyerukan persatuan seluruh umat Islam dalam mendukung keyakinan mereka. Lebih jauhnya lagi, sebagai sebuah konsep keagamaan, konsep Pan-Islamisme ini sebenarnya telah sejak lama ada semenjak awal hadirnya Islam. Ulama dan *fuqaha* sering menggunakan konsep ini untuk mendorong umat Islam agar bisa membangun kerja sama dan solidaritas. Secara ideal, memang Pan-Islamisme ini menekankan agar umat Islam bisa bersatu secara universal, seperti yang pernah terjadi di masa awal-awal Islam atau masa kerajaan imperium Islam di masa lalu. Begitupun, karena memang agama Islam merupakan agama yang sangat politis, begitu pula konsep Pan-Islamisme ini. Maka, terutama sejak 1870-an ketika kolonialisme Eropa sedang memuncak, konsep Pan-Islamisme ini juga mulai diterjemahkan sebagai ideologi defensif umat Islam untuk menaikkan moral umat yang tengah didominasi oleh para penjajah dan sekaligus untuk menjaga negara Islam lainnya yang masih merdeka dari nasib serupa.³² Secara lebih sederhana, Pan-

³¹ *Ibid.*

³² John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*. New York: Oxford University Press, 1995, hlm. 300-301.

Islamisme sendiri bisa diterjemahkan sebagai suatu langkah pembaharuan atau gagasan untuk menyatukan dunia Islam dengan semangat kaum muslim atau perjanjian antara pemerintah-pemerintah Islam yang dipimpin oleh pemimpin paling kuat dan besar.³³

Lebih luasnya lagi terminologi Pan-Islamisme sendiri, dapat dipahami dari tiga pengertian. Pertama, penentangan secara umum terhadap kolonialisme Barat dengan berbasis Islam dan umat Islam di setiap daerah koloni. Kedua, alat yang digunakan Sultan Khilafah Utsmaniyyah, Abdul Hamid II (berkuasa, 1876-1909 M) untuk mempertahankan dan mengembangkan pengaruh kekuasaan Khilafah Utsmaniyyah atas dunia Islam. Ketiga, usaha membangkitkan kembali sistem kekhalifahan pasca keruntuhan Khilafah Utsmaniyyah pada tahun 1924.³⁴ Memang, bahwa pada dasarnya artikulasi dari istilah Pan-Islamisme ini memang seringkali berubah dan berbeda satu sama lainnya, namun semuanya dipraktikkan dengan semangat yang sama juga.

2.2 Dinamika Sosial Politik Umat Islam di Hindia Belanda

Munculnya hubungan antara Pan-Islamisme dengan umat Islam di Hindia Belanda sendiri memang tidak bisa dilepaskan dari kondisi umat Islam di Hindia Belanda sejak awal kedatangan bangsa Belanda sampai seterusnya. Kehadiran bangsa Belanda di Hindia Timur yang mulanya diwakili oleh VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*, Serikat Dagang Hindia Timur) pada abad ke-16, suatu perusahaan dagang yang dikuasai oleh Tuan Tujuh Belas (*Heeren Seventen*) peguasa kaya di negeri Belanda. VOC datang ke Hindia Timur bertujuan untuk mencari rempah-rempah yang berharga murah untuk kemudian bisa dijual kembali dengan harga yang lebih mahal ke khalayak Eropa. Anehnya, tidak seperti cara berniaga manusia pada umumnya, VOC melakukan aktivitas perniagaan layaknya segrombolan *gangster* yang melabrak kekuasaan lokal di Hindia Timur. Bala tentara Kerajaan Belanda lengkap dengan senjata ikut serta diutus secara resmi oleh

³³ Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di Timur Tengah*. Jakarta: Djambatan, 1995, hlm. 288.

³⁴ Departemen Agama RI, *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Departemen Agama, 1993, hlm. 79-80.

kerajaan, bersamaan dengan maskapai dagang ini, mereka kemudian mengambil alih sumber daya alam dan hulu-hulu produksi.³⁵ Semakin lama, semakin dalam pula VOC bercokol di kawasan Hindia Timur dengan ikut serta memperkeruh iklim politik kerajaan dan antar kerajaan di kawasan ini dengan cara menjalankan strategi *divide et impera* (pecah belah, adu domba; lalu kuasai), guna menanggung keuntungan sebesar-besarnya bagi kepentingan mereka. Sedikit demi sedikit VOC akhirnya secara bertahap berhasil menaklukkan kawasan ini, mulai dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga Maluku.

Namun demikian, seiring berjalannya waktu, VOC dilanda krisis internal dengan suburnya korupsi dan nepotisme, sampai-sampai singkatan VOC diplesetkan orang menjadi *Vergaan Onder Corruptie* (Tenggelam Karena Korupsi).³⁶ Dengan hutang yang menggunung hingga mencapai 134.000.000 gulden (setara dengan sekitar 12 miliar dollar AS hari ini), VOC dinyatakan pailit dan bubar pada 1 Januari 1800.³⁷ Aset-aset VOC yang tidak bergerak, seperti benteng dan daerah produksi rempah-rempah di Hindia Timur, kemudian diambil alih oleh negara. Itulah diantara aset Kerajaan Belanda di Hindia Timur yang kemudiannya menjadi wilayah kekuasaan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dengan Batavia menjadi pusat administrasinya. Koloni Belanda di Hindia Timur ini dipimpin oleh seorang Gubernur Jenderal yang diangkat oleh Mahkota Kerajaan di negeri Belanda dengan usul dari Menteri Urusan Jajahan.³⁸

Semenjak Revolusi Prancis yang berkobar-kobar pada tahun 1789, Belanda juga akhirnya ikut tersengat dengan slogan *liberte, egalite, fraternite* (kebebasan, kesetaraan, persaudaraan) yang senantiasa dielu-elukan dalam Revolusi Prancis. Paham liberalisme yang ditularkan melalui Revolusi Prancis ini membuat Belanda juga tergelitik untuk melakukan politik *Pax-Neerlandica*, yaitu usaha Belanda untuk mengekspansi hegemoni mereka serta merebut ketundukan, ketaatan, dan loyalitas dari penduduk tanah jajahan menjadi hanya untuk penguasa Belanda.

³⁵ Tiar Anwar Bachtiar, *Jas Mewah*. Yogyakarta: Pro-U Media, 2018, hlm. 261.

³⁶ Marwati Djoened Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta: Balai Pustaka, 2010, hlm. 51.

³⁷ Nicko Pandawa, *op.cit*, hlm. 134-135.

³⁸ Marwati Djoened Poesponegoro, *op.cit*, hlm. 52; Robert van Niel, *Munculnya Elite Modern Indonesia*. Penerjemah Zahara Deliar Noer, Jakarta: Pustaka Jaya, 2009, hlm. 23.

Menurut Kartodirdjo, ketika zaman VOC dulu, hasil bumi di Hindia Timur tidak bisa serta merta dirampas langsung dari tangan rakyat, akan tetapi mereka harus terlebih dahulu melalui tangan para penguasa pribumi yang bekerja sama dengan VOC. Namun demikian, dalam pandangan Pemerintah Kolonial Belanda yang menjadi pengganti VOC, persoalan remeh temeh dan ruwet birokrasi seperti itu, dianggap telah bertentangan dengan ideologi liberalisme ekonomi yang lebih menghendaki kebebasan individu perseorangan, perdagangan, dan kepemilikan yang lebih luas. Maka kemudian, dengan adanya politik *Pax-Neerlandica*, penghisapan kekayaan alam di Hindia Belanda kepada penjajah akan lebih mudah dan leluasa jika bisa mengubah pola hubungan antara Belanda dengan para penguasa pribumi menjadi seperti pola antara tuan dengan budak.³⁹ Selain itu, lebih jauhnya Belanda juga dengan *Pax-Neerlandica*-nya hendak mengubah loyalitas para penguasa dan rakyat di kepulauan Melayu-Jawa yang beragama Islam menuju loyalitas kepada Raja Belanda secara radikal.

Perlawanan rakyat Jawa di bawah patronase Pangeran Diponegoro selama Perang Jawa (1825-1830) memang berhasil dipadamkan oleh Belanda. Namun demikian, perlawanan yang berlarut-larut ini telah menghabiskan tenaga manusia dan dana yang besar di pihak Belanda, sehingga hal ini telah menjadi suatu kekalahan tersendiri bagi pihak Belanda. Begitupun, kondisi keuangan di negeri Belanda sendiri sedang memburuk akibat hutang dan bunganya melambung tinggi pasca peperangan melawan Napoleon. Atas dasar itu, Johannes van den Bosch (1780-1844) segera mengusulkan kepada Raja Belanda untuk diadakan “Sistem Tanam Paksa” yang dibalut olehnya dengan istilah yang lebih manis, “Sistem Budidaya” (*cultuurstelsel*) di Hindia Timur guna menutup bolongnya keuangan Belanda. Tibalah ia di Jawa pada Januari 1830 sebagai gubernur jendela yang baru.⁴⁰ Usulan Van den Bosch ini terbukti, Belanda meraih keuntungan yang sangat besar dan ajek. Sejak tahun 1831 hingga tahun 1877 perbendaharaan kerajaan

³⁹ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999, hlm. 335-349.

⁴⁰ M.C. Ricklefs, *op.cit*, hlm. 259-260.

Belanda telah menerima asupan dana hingga mencapai 832 juta gulden, hingga bisa membuat perekonomian dalam negeri Belanda stabil.⁴¹

Selain Jawa dan Sumatera, Belanda juga kemudian memantapkan hegemoninya di pulau-pulau lain yang cakupannya seluas teritori Republik Indonesia hari ini. Hal ini dilakukan, selain dalam rangka untuk menundukkan penguasa-penguasa lokal dalam konteks *Pax Neerlandica*, juga bertujuan untuk mencegah kekuatan Barat lain mengambil alih hak Belanda atas wilayah jajahannya. Keuntungan fantastis yang Belanda dapatkan dari *cultuurstelsel* memang membuat negara kolonial lain seperti Inggris menelan dahaganya. Sepanjang abad ke-19 Inggris memang telah mengungguli Belanda dalam hal kekuatan maritim dan perdagangannya di Selat Malaka. Pendirian Penang (1786) dan Singapura (1819) oleh Inggris menyebabkan hubungan perdagangan Inggris dengan Sumatera semakin bertambah luas.⁴²

Untuk menghindari terjadinya konflik diantara Inggris dan Belanda di wilayah Selat Malaka, maka kedua belah pihak akhirnya memutuskan untuk mengukuhkan Perjanjian London pada tahun 1824 dengan tujuan untuk membagi kue kekuasaan di antara mereka, yang hasilnya adalah menjadikan Semenanjung Malaya untuk Inggris dan Sumatera untuk Belanda.⁴³ Sedangkan, dalam perjanjian tersebut, posisi kesultanan Aceh dibiarkan menggantung. Sadar bahwa kedaulatan negaranya dijadikan bulan-bulanan oleh Inggris dan Belanda, Sultan Aceh, 'Ala' al-Din Ibrahim Mansur Syah, memperkuat patroli atas perairan Sumatera dan memblokode semua kemungkinan infiltrasi pengaruh asing dari kapal-kapal dagang Inggris, Belanda, Amerika, dan Italia. Hingga kemudian, berlandaskan kepada Perjanjian London 1824, pemerintahan Batavia menganggap langkah yang telah dilakukan Aceh tersebut dianggap sebagai bagian dari akvitas perompakan yang menjadikan pemerintah Batavia merasa wajib untuk melindungi pelayaran internasional.⁴⁴

⁴¹ *Ibid*, hlm. 266.

⁴² Nicko Pandawa, *op.cit*, hlm. 136.

⁴³ M.C. Ricklefs, *op.cit*, hlm. 306-307.

⁴⁴ Nicko Pandawa, *op.cit*, hlm. 137.

Konstelasi yang terus mendidih dengan pihak Belanda menjadikan Aceh dalam situasi yang sulit dan membutuhkan dukungan dari tumpuan mereka sejak dahulu kala, yakni Khilafah Utsmaniyyah. Hubungan kaum Muslim di Hindia Timur, khususnya Aceh, dengan Khilafah Utsmaniyyah ketika sedang jaya-jayanya di masa lampau begitu membekas di memori rakyat yang terjajah dan terancam oleh Belanda itu. Bahkan Sultan ‘Ala’ al-Din Ibrahim Mansur Syah dalam suratnya kepada Sultan Abdul Majid I mendaulatkan bahwa penduduk Aceh dan Sumatera tergolong ke dalam rakyat negara adidaya Utsmaniyyah dari generasi ke generasi. Sultan Ibrahim Mansur Syah bahkan mengakui, bahwasanya Khilafah Utsmaniyyah akan senantiasa menjadi “tempat perlindungan bagi para pencari kebaikan dan tempat penuh kemuliaan yang tidak akan celaka orang yang mendatangnya”.⁴⁵

Demi untuk memperkuat penguasaan dalam sektor politik dan ekonomi, Pemerintah Kolonial Belanda juga mencoba mendigdayakan *Pax-Neerlandica*-nya dari aspek superioritas rasial. Sebagai langkah penerapannya, Belanda menerapkan kebijakan Orang Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*), yang membagi ‘kasta’ penduduk Hindia Belanda menjadi tiga; orang Eropa (*Europeanen*), orang Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) yang terdiri dari orang Arab, Cina, dan India, serta orang-orang pribumi (*Inlander*). Tentu, peraturan yang dibuat ini semata-mata hanya untuk keuntungan orang-orang Eropa, khususnya Belanda dan sebaliknya sangat merugikan golongan Timur Asing, di samping orang pribumi.⁴⁶ Begitupun peraturan ini juga dibuat untuk menjauhkan antara penduduk lama dengan pendatang yang dikhawatirkan akan saling mempengaruhi sehingga nantinya dapat merugikan pemerintah Kolonial Belanda.

Pengaplikasian dari pembagian kasta ini adalah yang pertama, adanya kebijakan sistem izin perjalanan (*passenstelsel*). Jika orang-orang Arab dan Cina ingin berpergian ke seluruh Hindia Belanda, meski jaraknya tidak jauh sama sekali,

⁴⁵ BOA, I.HR. 73/3511. Mehmet Akif Terzi, dkk., (Ed), *Turki Utsmani-Indonesia: Relasi dan Korespondensi Berdasarkan Dokumen Turki Utsmani*. Penerjemah Muhammad Zuhdi, Istanbul: Hitay, 2017, hlm. 182

⁴⁶ Alwi Alatas, *Pan-Islamism and Islamic Resurgence in the Netherlands East Indies: The Role of ‘Abd Allah b. ‘Alwi b. ‘Abd Allah al-Attas (1840-1929)*. (Kuala Lumpur: International Islamic University of Malaysia, August 26-28, 2005), hlm. 1-2.

mereka harus punya surat jalan sebagai tanda telah mendapat izin. Tentu, kebijakan semacam ini amat menyesak dan menghambat mobilitas mereka. Kedua adalah adanya kebijakan mengenai sistem hunian khusus (*wijkenstelsel*). Orang-orang Arab dan Cina hanya bisa tinggal di daerah khusus di kota-kota tertentu yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, semacam *ghetto* yang disebut Kampung Arab.⁴⁷ Bahkan orang Arab diberi tempat yang paling tidak sehat di suatu kota. Hal ini sudah cukup membuat orang Arab dan Cina sakit hati. Apalagi ketika Pemerintah Batavia –yang barangkali terkagum-kagum dengan Jepang sebagai salah satu negara adidaya yang muncul pada awal abad ke-20– menggolongkan warga Jepang yang tinggal di Hindia Belanda sebagai golongan *Europeanen* pada tahun 1899, tentu orang Arab dan Cina makin tak terima dengan perlakuan diskriminatif tersebut.⁴⁸

Agar bisa memperbaiki nasib yang kian sesak, mereka akhirnya berpaling ke negeri asal mereka masing-masing untuk mendapat dukungan. Orang Arab yang tertekan dengan *Vreemde Oosterlingen* ini tidak melihat kekuasaan yang bisa menolong mereka kecuali kepada Khilafah Utsmaniyyah. Reaksi kaum Muslim di Hindia Belanda yang meminta pertolongan kepada Khalifah di Istanbul tentu diperhatikan dengan serius oleh pejabat-pejabat kolonial. Pan-Islamisme yang dikatakan Snouck Hurgronje sebagai ancaman bagi penjajah tentu berasal dari Khilafah Utsmaniyyah. Menurut Snouck, bahwa

kaum Muslim melihat bahwa kesatuan kembali segenap kaum Muslim di bawah panji Khilafah Konstantinopel adalah satu-satunya sarana untuk bisa keluar dari keadaan tidak berdaya, yang sejak ambruknya wilayah Islam makin lama makin terasa berat.⁴⁹

Bahkan lebih jauhnya lagi Pan-Islamisme berkembang tidak hanya identik dengan Turki bersama Khilafah Utsmaniyyahnya, tetapi juga dengan pusat wilayah islam lainnya yaitu Hijaz dan Mesir. Terutama memang dengan wilayah Mesir

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 2.

⁴⁸ Kees van Dijk, “Ketakutan Penjajah, 1890-1918: Pan-Islamisme dan Persekongkolan Jerman-India”. Dalam Nico J. G. Kaptein (Ed). *Kekacauan dan Kerusuhan: Tiga Tulisan tentang Pan-Islamisme di Hindia Belanda Timur pada Akhir Abad Kesembilan Belas dan Awal Abad Kedua Puluh*. Penerjemah Lilian D. Tedjasudhana, Jakarta: INIS, 2003, hlm. 29-30.

⁴⁹ C. Snouck Hurgronje, *op.cit*, hlm. 173-174.

bersama al-Afganinya, yang bahkan menurut Kahin justru Pan-Islamisme yang berasal dari wilayah Mesir inilah yang lebih berbahaya dan lebih banyak berperan nantinya dalam menumbangkan kekuasaan Belanda di Hindia Belanda. Hal ini sebab Pan-Islamisme ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah Belanda yang lebih fokus kepada Pan-Islamisme Khilafah.⁵⁰

Keadaan serba sulit yang sedang menimpa umat Islam di Hindia Belanda tersebutlah, pada akhirnya menjadi pendorong tersendiri bagi munculnya pengaruh Pan-Islamisme di Hindia Belanda. Hal ini wajar mengingat bahwa di antara kesulitan tersebut disebabkan oleh ulah penjajah, maka Pan-Islamisme yang juga diterjemahkan sebagai sebuah gerakan anti kolonialisme menjadi sebuah jalan atau alat bagi umat Islam di Hindia Belanda untuk ikhtiar agar bisa keluar dari kesulitan tersebut. Sehingga kemudiannya, hal tersebut pun menjadi kegelisahan tersendiri bagi Belanda, mereka sering sekali disibukkan dan direpot dengan banyak munculnya gejala-gejala Pan-Islamisme di wilayah Hindia Belanda ini, yang notabeneanya merupakan wilayah kolonialisme mereka.

⁵⁰ George McTurnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu, 2022, hlm. 52-53; jadi memang diawal sudah disinggung bahwa makna dari Pan-Islamisme ini memiliki banyak penafsiran, hal ini tidak bisa lepaskan dengan para tokoh Pan-Islamisme yang memiliki pengaruh dalam mempropagandakan Pan-Islamisme. Tokoh Pan-Islamisme tersebut adalah Abdul Hamid II serta Jamal al-Din al-Afgani dan Muhammad ‘Abduh. Sultan Abdul Hamid yang merupakan Khalifah dari Kekhilafahn Utsmaniyyah mempropagandakan Pan-Islamisme sebagai persatuan total seluruh umat Islam untuk membentuk perlawanan terhadap Eropa di bawah satu kepemimpinan, dalam hal ini adalah di bawah kepemimpinan Khilafah Utsmaniyyah. Sedangkan menurut al-Afgani, Pan-Islamisme (peperangan agama) dan nasionalisme (perjuangan bangsa) merupakan dua hal yang saling melengkapi satu sama lain dalam manifesto politiknya, yakni pengenalan sistem pemerintahan liberal ke negeri-negeri Muslim sekaligus untuk membentuk perlawanan kepada Eropa dalam bentuk persatuan total umat Islam. Persatuan yang dimaksud bukanlah persatuan umat Islam sedunia di bawah kepemimpinan Khilafah Utsmaniyyah, tapi hanya sekedar persatuan solidaritas antar-umat Islam, sementara kepemimpinan perlawanan mereka terhadap kolonialisme diserahkan kepada kaum Muslim di negerinya masing-masing, dibangun berdasarkan semangat patriotism dan asas “menentukan nasib sendiri”; derivasi dari paham individualisme ala Eropa. Penggabungan unsur nasionalisme dan Pan-Islamisme oleh al-Afgani inilah yang diistilahkan Gibb dengan istilah “*Pan-Islamic Nationalism*”, dan diistilahkan pula oleh Keddie dengan sebutan “*Proto-nationalism*”. Sedangkan ‘Abduh sendiri berperan dalam menyebarkan pengaruh al-Afgani sehingga bisa dikatakan bahwa pemikiran Pan-Islamisme al-Afgani dan ‘Abduh memiliki kesamaan. Nicko Pandawa, *op.cit*, hlm. 104-105.